

MAKALAH AKUNTANSI PERBANKAN
“STANDAR AKUNTANSI DALAM PERBANKAN”

Dosen Pengampu:

Dr. Albert Meydiantoro, S.Pd., M.Pd.

Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



Disusun oleh:

Kelompok 9

Irenius Juni Nugroho 2313031032

Igha Mawardhani 2313031043

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

KATA PENGANTAR

Kami mengucapkan syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT atas segala rahmat dan petunjuk-Nya yang telah memungkinkan kami menyelesaikan makalah ini dengan judul “Standar Akuntansi dalam Perbankan”. Makalah ini kami buat untuk menjalankan tugas dari mata kuliah Akuntansi Perbankan. Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Bapak Dr. Albert Meydiantoro, S.Pd., M.Pd., dan Ibu Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd., sebagai dosen pengampu mata kuliah tersebut, yang telah memberikan tugas ini dan membantu kami memperdalam pengetahuan serta pemahaman tentang materi yang diajarkan. Tak lupa, kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, sehingga makalah ini bisa rampung.

Meski begitu, kami sadar bahwa karya ini masih banyak kekurangannya dan belum sempurna. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang memperbaikinya di kemudian hari.

Bandar Lampung, 27 Oktober 2025

Kelompok 9

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Masalah.....	3
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1. Pengertian Standar Akuntansi Perbankan	4
2.2. Penerapan PSAK 71, 72, 73, dan Kesesuaiannya dengan IFRS	4
2.3. Perubahan laporan keuangan bank setelah penerapan standar akuntansi keuangan terbaru.....	7
2.4. Tantangan yang dihadapi.....	10
2.5. Dampak penerapan standar akuntansi terbaru	13
BAB III PENUTUP	15
3.1 Kesimpulan	15
3.2 Saran.....	15
DAFTAR PUSTAKA	16
STUDI KASUS.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri perbankan itu seperti tulang punggung ekonomi sebuah negara, karena punya peran krusial sebagai penghubung keuangan antar pihak. Bank-bank ini mengumpulkan uang dari masyarakat lewat simpanan, lalu mengalirkannya kembali dalam bentuk pinjaman, investasi, dan jasa keuangan lainnya ke sektor-sektor yang produktif. Dengan cara itu, bank membantu memastikan aliran dana lancar, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga kestabilan sistem keuangan di tingkat nasional. Kepercayaan orang-orang terhadap perbankan jadi faktor penting agar industri ini bisa bertahan, dan salah satu hal utama yang membangun kepercayaan itu adalah laporan keuangan yang jujur, tepat, dan mengikuti standar akuntansi yang berlaku (Oktavianus, 2025).

Laporan keuangan bank itu berbeda dari laporan perusahaan biasa. Kebanyakan aset dan utangnya berbentuk instrumen keuangan, kayak pinjaman, simpanan, obligasi, plus derivatif. Nah, karena rumitnya begitu, bank harus pakai standar akuntansi yang super ketat dan cocok sama standar global. Sesuai dengan upaya menyamakan dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS), Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sudah keluarin tiga standar utama, yaitu PSAK 71 soal *Instrumen Keuangan*, PSAK 72 tentang *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*, dan PSAK 73 mengenai *Sewa*. Ketiga standar ini resmi berlaku mulai 1 Januari 2020, dan ini jadi milestone penting buat naikin kualitas laporan keuangan di perbankan Indonesia (IAI, 2017).

Penerapan PSAK baru ini menuntut bank untuk memperkuat sistem pelaporan, tata kelola, dan manajemen risiko agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan kajian terbaru, implementasi PSAK 71 menyebabkan peningkatan cadangan kerugian kredit dan mendorong bank untuk lebih berhati-hati dalam ekspansi kredit. Sementara PSAK 72 dan 73 meningkatkan transparansi pendapatan serta pengakuan aset-liabilitas. Standar-standar ini menjadi langkah penting dalam memperkuat stabilitas keuangan

nasional dan menyesuaikan praktik akuntansi Indonesia dengan standar global (Kartin *et al* 2023).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang di maksud dengan Akuntansi Perbankan?
2. Bagaimana penerapam PSAK 71, 72, dan 73 dalam sektor perbankan Indonesia serta kesesuaiannya dengan standar IFRS?
3. Apa perubahan signifikan yang terjadi dalam penyajian laporan keuangan bank setelah penerapan standar akuntansi keuangan terbaru tersebut?
4. Apa saja tantangan yang dihadapi bank dalam proses transisi dan penerapan PSAK 71, 72, dan 73?
5. Bagaimana dampak penerapan standar akuntansi terbaru terhadap transparansi, kinerja keuangan, dan kepercayaan investor di sektor perbankan?

1.3 Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui apa yang di maksud dengan Akuntansi Perbankan
2. Untuk mengetahui implementasi PSAK 71, 72, dan 73 dalam sektor perbankan Indonesia serta menilai kesesuaiannya dengan standar IFRS.
3. Untuk mengetahui perubahan signifikan dalam penyajian laporan keuangan bank setelah penerapan standar akuntansi keuangan terbaru.
4. Untuk mengetahui dan mengevaluasi berbagai tantangan yang dihadapi bank selama proses transisi dan penerapan PSAK 71, 72, dan 73.
5. Untuk menilai dampak penerapan standar akuntansi keuangan terbaru terhadap tingkat transparansi, kinerja keuangan, dan kepercayaan investor dalam industri perbankan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Standar Akuntansi Perbankan

Akuntansi perbankan adalah cabang akuntansi yang khusus mengatur pencatatan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan transaksi keuangan yang khas pada , misalnya penghimpunan dana (deposito), penyaluran kredit, investasi surat berharga, transaksi derivatif, pendapatan bunga dan non-bunga, serta pengelolaan likuiditas. Tujuannya menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi bank secara wajar sehingga pemangku kepentingan (nasabah, investor, regulator) dapat mengambil keputusan yang tepat.

Menurut IAI, PSAK itu bisa didefinisikan sebagai panduan prosedur yang lengkap untuk menyusun laporan keuangan akuntansi, yang di dalamnya terdapat aturan-aturan soal pencatatan, penyusunan, pengelolaan, dan penyampaian laporan keuangan. Nah, prinsip-prinsip dasar penyajian laporan keuangan yang ditentukan PSAK ini tujuannya agar mudah dibandingkan sama laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan dari entitas lain (Sibarani, 2021).

Laporan keuangan bank memiliki karakteristik khusus karena sebagian besar aset dan kewajibannya berupa instrumen keuangan seperti kredit, deposito, dan surat berharga. Oleh sebab itu, pengukuran nilainya harus dilakukan dengan hati-hati, terutama dalam menentukan cadangan kerugian kredit dan nilai wajar aset. Dalam konteks ini, standar akuntansi seperti PSAK 71 (Instrumen Keuangan), PSAK 72 (Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan), dan PSAK 73 (Sewa) sangat penting untuk memastikan laporan keuangan bank sesuai dengan standar internasional (*IFRS*) (PwC Indonesia, 2023).

2.2 Penerapan PSAK 71, 72, 73, dan Kesesuaiannya dengan IFRS

Perbankan merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan suatu negara. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disusun oleh bank harus menggambarkan kondisi keuangan secara akurat, transparan, dan sesuai dengan standar internasional. Sejalan dengan perkembangan globalisasi dan integrasi ekonomi, Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK-IAI) telah mengadopsi

beberapa standar baru, yaitu PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73, yang merupakan hasil konvergensi dari IFRS 9, IFRS 15, dan IFRS 16. Ketiga standar ini membawa perubahan besar dalam cara bank mengakui aset, pendapatan, dan kewajiban sewa. Tujuannya adalah agar laporan keuangan perbankan di Indonesia dapat sejalan dengan praktik internasional dan meningkatkan kepercayaan investor global.

1. **PSAK 71** (Instrumen Keuangan)

PSAK 71 ialah pengganti PSAK 55 adalah akibat adopsi dari IFRS 9, yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020. Walaupun PSAK 55 masih dipergunakan dalam perkara macro hedging, PSAK 71 sebagai acuan utama pada pelaporan keuangan untuk aset dan liabilitas keuangan. Tujuan utamanya yakni memberikan info yg lebih relevan dan berguna bagi pengguna laporan keuangan dalam menilai jumlah, waktu, serta ketidakpastian arus kas masa depan suatu entitas (IAI, 2020). Pada PSAK 71, instrumen keuangan diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama: aset keuangan, liabilitas keuangan, serta derivatif melekat.

Perubahan terbesar dari PSAK 71 dibandingkan PSAK 55 adalah dalam metode pencadangan kerugian kredit. Jika sebelumnya cadangan dibentuk setelah terjadi gagal bayar (*incurred loss*), kini bank dan perusahaan diwajibkan mengakui cadangan sejak awal masa kredit berdasarkan ekspektasi kerugian kredit di masa depan (*expected credit loss / ECL*). Artinya, perusahaan harus memperkirakan potensi kerugian atas kredit lancar, ragu-ragu, maupun macet, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang akan datang. Sistem ini mendorong perbankan lebih berhati-hati dalam pengelolaan risiko kredit dan memperkuat ketahanan sektor keuangan (IAI, 2020).

2. **PSAK 72** (Pendapatan Kontrak Pelanggan)

PSAK 72 merupakan adopsi dari IFRS 15 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2020. Standar ini menggantikan beberapa aturan lama seperti PSAK 23, PSAK 34, serta ISAK 10, 21, 27, dan PSAK 44 agar pengakuan pendapatan lebih seragam dan transparan.

Dalam PSAK 72, pengakuan pendapatan dilakukan melalui 5 langkah utama, yaitu:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. memilih kewajiban kinerja.
3. menetapkan harga transaksi.
4. Mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja.
5. Mengakui pendapatan saat kewajiban terpenuhi.

Penerapan PSAK 72 membentuk pendapatan hanya diakui Bila perusahaan benar benar telah memenuhi kewajiban kepada pelanggan. Dampaknya berbeda pada setiap Perusahaan, ada yang hanya perlu menyesuaikan pengungkapan laporan, tetapi terdapat pula yg perlu mengubah sistem kontrak dan usaha supaya sesuai dengan ketentuan baru (PwC Indonesia, 2023). Pada laporan keuangan, pendapatan asal kontrak bisa tersaji menjadi asset kontrak, liabilitas kontrak, atau piutang, tergantung di hubungan antara kinerja perusahaan serta pembayaran pelanggan. Tujuan utamanya adalah menaikkan transparansi serta membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami sumber dan waktu pengakuan pendapatan perusahaan.

3. **PSAK 73** (Sewa)

PSAK 73 adalah adopsi dari IFRS 16 tentang leases yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020. Standar ini menggantikan beberapa ketentuan lama seperti PSAK 30 perihal sewa dan beberapa ISAK terkait, mirip ISAK 8, 23, 24, serta 25, yg sebelumnya mengatur transaksi sewa menggunakan pendekatan tidak selaras.

Perubahan utama pada PSAK 73 artinya pada perlakuan akuntansi penyewa (lessee). Jika sebelumnya hanya sewa pembiayaan (finance lease) yg diakui dalam laporan posisi keuangan, sekarang hampir semua transaksi sewa harus diakui menjadi aset serta liabilitas oleh penyewa. Hanya sewa dengan jangka kurang dari 12 bulan atau menggunakan nilai rendah (contohnya sewa laptop atau ponsel) yang dikecualikan serta boleh tetap dicatat menjadi operating lease.

Dalam laporan keuangan, penyewa wajib menyajikan aset hak-guna (right-of-use asset) secara terpisah dari aset lainnya, dan liabilitas sewa secara terpisah dari kewajiban lain. Bila tidak tersaji secara terpisah, entitas harus menyampaikan pos mana pada laporan keuangan yang meliputi aset serta liabilitas sewa tersebut.

Sementara pada laporan laba rugi, entitas wajib menampilkan 2 komponen utama, yaitu beban penyusutan aset hak-guna serta beban bunga atas liabilitas sewa, yang diklasifikasikan sebagai biaya keuangan. Adapun pada laporan arus

kas, pembayaran sewa dibedakan menjadi tiga bagian:

1. Pembayaran pokok liabilitas sewa → aktivitas pendanaan.
2. . Pembayaran bunga → sesuai menggunakan ketentuan PSAK dua (Laporan Arus Kas).
3. Pembayaran sewa jangka pendek atau aset bernilai rendah → kegiatan operasi

Penerapan PSAK 73 memberikan transparansi lebih baik dalam pelaporan kewajiban sewa, karena seluruh komitmen sewa kini tercermin dalam neraca perusahaan. Hal ini membantu investor dan pihak lain menilai secara lebih akurat posisi keuangan serta beban masa depan perusahaan (PwC Indonesia, 2023).

2.3 Perubahan laporan keuangan bank setelah penerapan standar akuntansi keuangan terbaru

Perubahan paling mendasar pada pelaporan keuangan bank di Indonesia pasca tahun 2020 didominasi oleh implementasi 3 baku baru: PSAK 71 (Instrumen Keuangan), PSAK 72 (Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan), dan PSAK 73 (Sewa). Perubahan ini, adalah adopsi yang berasal IFRS (International Financial Reporting Standards), bertujuan buat meningkatkan komparabilitas dan kualitas info keuangan.

3. Penggantian Model Kerugian Kredit: Dari *Incurring Loss* ke *Expected Credit Loss* (PSAK 71)

Perubahan paling fundamental terletak pada PSAK 71 (Instrumen Keuangan). Standar ini mengganti model Kerugian yang Telah Terjadi (*Incurring Loss*) menjadi model Kerugian Kredit Ekspektasian (*Expected Credit Loss/ECL*).

- ❖ Proaktivitas Pencadangan Risiko: Di bawah PSAK 71, bank wajib mencadangkan potensi kerugian kredit sejak awal pemberian pinjaman (*front-loading*), alih-alih menunggu hingga kerugian benar-benar terjadi. Model ini bersifat berwawasan ke depan (*forward-looking*), mengharuskan bank mempertimbangkan data historis, kondisi saat ini, dan yang paling penting, perkiraan kondisi makroekonomi di masa depan (Arifullah & Firmansyah, 2021).
- ❖ Dampak pada Neraca dan Laba Rugi: Akibatnya, nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) bank meningkat signifikan. Peningkatan CKPN ini dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi, yang pada periode awal implementasi (Tahun 2020) menyebabkan penurunan drastis pada laba bersih beberapa bank (Jurnal STIE JB, 2023). Hal ini menunjukkan penyajian posisi keuangan yang jauh lebih hati-hati (*prudent*) dalam mengestimasi kualitas aset.

4. Standardisasi Pengakuan Pendapatan Non-Bunga (PSAK 72)

PSAK 72 (Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan), yang mengadopsi IFRS 15, mengatur pengakuan pendapatan yang berasal dari kontrak dengan pelanggan. Bagi bank, fokus utama PSAK 72 adalah pada pendapatan non-bunga, seperti pendapatan dari komisi, biaya administrasi, dan pendapatan jasa perbankan yang kompleks. Pendapatan bunga (yang merupakan pendapatan utama bank) tetap diatur oleh PSAK 71.

1. Model Lima Langkah Pengakuan Pendapatan: Standar ini mengharuskan bank menggunakan model lima langkah untuk menentukan kapan dan berapa banyak pendapatan yang harus diakui. Prinsip intinya adalah pengakuan

pendapatan harus mencerminkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan sebesar jumlah imbalan yang diharapkan oleh entitas (Dwimartani, 2020).

2. Dampak pada Waktu Pengakuan Pendapatan: Perubahan signifikan terjadi pada waktu (timing) pengakuan pendapatan jasa. Sebagai contoh, biaya jasa yang terkait dengan aktivitas pinjaman yang kompleks atau jasa perwalian (*trust activities*) mungkin tidak lagi dapat diakui secara penuh di awal, tetapi harus dialokasikan dan diakui sepanjang periode pemberian jasa (IAI, 2017). Hal ini membuat pendapatan jasa (*fee-based income*) disajikan dengan lebih akurat sesuai dengan substansi ekonomi pengalihan jasa.
3. Peningkatan Pengungkapan: PSAK 72 juga mewajibkan pengungkapan yang jauh lebih detail mengenai pendapatan non-bunga, termasuk pemisahan antara pendapatan yang diakui pada satu waktu (*at a point in time*) dan pendapatan yang diakui sepanjang waktu (*over time*). Hal ini meningkatkan transparansi sumber pendapatan bank.

5. Kapitalisasi Sewa (*On-Balance Sheet*) dengan PSAK 73

PSAK 73 (Sewa) mengubah cara bank mencatat transaksi sewa, terutama ketika bank bertindak sebagai penyewa (*lessee*) atas aset-aset seperti gedung kantor cabang atau peralatan IT.

- ❖ Mengeliminasi *Off-Balance Sheet Financing*: Standar ini menghapus praktik sewa operasi yang sebelumnya dicatat di luar neraca (*off-balance sheet*). Kini, bank wajib mengakui aset hak guna (*Right-of-Use Asset*) dan liabilitas sewa di dalam neraca untuk hampir semua sewa dengan masa sewa lebih dari 12 bulan (FEB UGM, 2019).
- ❖ Dampak pada Rasio Keuangan: Dengan penambahan liabilitas sewa ke dalam neraca, total aset dan total liabilitas bank meningkat. Konsekuensinya, rasio *leverage* bank, seperti *Debt to Equity Ratio* (DER), dapat mengalami peningkatan. Perubahan ini memberikan gambaran yang

lebih komprehensif mengenai kewajiban pendanaan bank, yang merupakan peningkatan transparansi yang signifikan.

2.4. Tantangan yang dihadapi

Proses transisi menuju standar akuntansi keuangan yang baru, terutama PSAK 71, bukanlah perkara mudah dan memerlukan upaya restrukturisasi yang masif di berbagai lini operasional perbankan. Tantangan yang dihadapi bank dalam mengimplementasikan PSAK 71, 72, dan 73 dapat dikelompokkan menjadi tiga area utama: infrastruktur dan data, dampak keuangan jangka pendek, dan kesiapan sumber daya manusia.

1. Tantangan Infrastruktur, Data, dan Pengembangan Model

Tantangan terbesar dalam penerapan PSAK 71 adalah tuntutan untuk beralih ke model Kerugian Kredit Ekspektasian (ECL), yang jauh lebih kompleks dibandingkan model sebelumnya. Model ECL mengharuskan bank untuk mengintegrasikan data internal dan eksternal, termasuk faktor makroekonomi, ke dalam perhitungan cadangan.

- ❖ **Kompleksitas Model Statistik yang Tinggi:** Bank ditantang untuk membangun, memvalidasi, dan mengelola model statistik yang canggih untuk memprediksi tiga komponen utama ECL: Probabilitas Gagal Bayar (*Probability of Default/PD*), Kerugian Jika Terjadi Gagal Bayar (*Loss Given Default/LGD*), dan Eksposur saat Gagal Bayar (*Exposure at Default/EAD*). Proses ini memerlukan pemahaman mendalam tentang ekonometri dan pemodelan risiko, yang mana keahlian ini seringkali terbatas dalam tim akuntansi tradisional (Arifullah & Firmansyah, 2021).
- ❖ **Kebutuhan Data Historis dan *Forward-Looking*:** Penerapan ECL menuntut bank memiliki infrastruktur data yang mumpuni. Tidak hanya data historis kegagalan bayar nasabah, tetapi juga data variabel makroekonomi terkait. Bank harus mampu menyediakan *input* yang kuat untuk memproyeksikan kondisi masa depan, seperti prediksi inflasi dan suku bunga. Memastikan akurasi, ketersediaan, dan integritas data ini merupakan hambatan teknologi yang signifikan,

membutuhkan investasi besar dalam sistem IT dan *data warehouse* (Motoviani, 2020 dalam Jurnal Universitas Suryadarma, 2021).

2. Tantangan Keuangan dan Tekanan Profitabilitas

Pada tahap awal, standar baru ini memberikan tekanan signifikan pada laporan keuangan, yang memengaruhi persepsi pasar dan keputusan strategis manajemen.

- ❖ Dampak Awal Terhadap Penurunan Laba: Tantangan terberat yang dihadapi bank adalah lonjakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) di periode awal penerapan PSAK 71. Perubahan dari pencadangan setelah kerugian terjadi menjadi pencadangan yang diantisipasi sejak awal (*front-loading*) menyebabkan beban operasional melonjak dan laba bersih menurun drastis. Penurunan laba ini, meskipun disebabkan oleh perubahan metodologi akuntansi, menimbulkan kesulitan bagi manajemen untuk menjelaskan kinerja kepada investor, analis, dan media.
- ❖ Modifikasi Rasio Keuangan: Penerapan PSAK 73 juga menimbulkan tantangan karena liabilitas sewa kini harus dicatat di neraca. Akibatnya, rasio *leverage* bank, seperti *Debt to Equity Ratio* (DER), secara otomatis akan meningkat (FEB UGM, 2019). Manajemen harus siap menjelaskan kepada pemangku kepentingan bahwa perubahan rasio ini merupakan konsekuensi akuntansi, bukan indikasi peningkatan risiko utang yang sesungguhnya.

3. Tantangan Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Koordinasi

Efektivitas penerapan standar baru ini sangat bergantung pada kapabilitas sumber daya manusia di berbagai departemen bank.

- ❖ Kebutuhan Kompetensi Lintas Fungsi: PSAK 71 dan 72 bersifat *principles-based* (berbasis prinsip), sehingga membutuhkan penilaian dan interpretasi yang matang. Diperlukan koordinasi yang erat dan pemahaman yang setara antara tim Akuntansi, Manajemen Risiko, dan IT (Chaya dan Chedid, 2020 dalam Jurnal

STIESIA, 2020). Tantangannya adalah menjembatani kesenjangan keahlian antara akuntan dan *risk modeler* yang memiliki latar belakang keilmuan berbeda.

- ❖ Pelatihan dan *Change Management*: Diperlukan investasi besar dalam pelatihan berkelanjutan untuk memastikan staf memahami bukan hanya aturan, tetapi juga *judgement* dan prinsip di balik standar baru ini. Proses *change management* ini sulit karena menyentuh prosedur operasional yang sudah bertahun-tahun berlaku di industri perbankan.

2.5. Dampak penerapan standar akuntansi terbaru

Penerapan standar akuntansi terbaru ini membawa konsekuensi jangka panjang yang diharapkan dapat memperkuat sektor perbankan dan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan kepada publik dan pasar modal.

1. Peningkatan Transparansi dan Kualitas Informasi

Aspek fundamental dari standar baru ini adalah peningkatan kualitas dan relevansi informasi keuangan, yang menjadi sangat penting dalam konteks industri perbankan yang sarat risiko.

- ❖ Pengakuan Risiko yang Lebih Proaktif: Model ECL di PSAK 71 mewajibkan bank untuk mengakui potensi kerugian kredit secara lebih cepat dan komprehensif, menghubungkan kondisi mikro nasabah dengan prospek makroekonomi (Sibarani, 2021). Dengan transparansi ini, laporan keuangan bank memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kesehatan portofolio aset, mengurangi kemungkinan kerugian besar yang tersembunyi hingga krisis terjadi. Hal ini membuat informasi menjadi lebih *prudent* dan prediktif bagi pengguna laporan.
- ❖ Neraca yang Lebih Komprehensif: PSAK 73 (Sewa) secara signifikan meningkatkan transparansi struktur pendanaan bank dengan memaksa kapitalisasi liabilitas sewa di neraca. Hal ini memungkinkan analis dan investor untuk melihat

seluruh kewajiban bank, dan memitigasi risiko *off-balance sheet financing* yang berpotensi menyembunyikan leverage keuangan bank (FEB UGM, 2019).

2. Dampak pada Kinerja Keuangan (Stabilitas Jangka Panjang)

Meskipun terdapat tekanan pada laba di awal, dampak jangka panjang terhadap kinerja keuangan adalah terciptanya stabilitas yang lebih baik.

- ❖ Memperkuat Daya Tahan (*Resilience*) Bank: Dengan mencadangkan kerugian lebih awal, bank telah membentuk bantalan (*buffer*) modal yang lebih besar dan kokoh. Cadangan yang terbentuk ini akan sangat efektif dalam menyerap kerugian saat kondisi ekonomi sedang lesu atau terjadi krisis (Motoviani, 2020 dalam Jurnal Universitas Suryadarma, 2021). Hasilnya, profitabilitas bank diharapkan menjadi lebih stabil (kurang volatil) dari waktu ke waktu karena kerugian tidak diakui secara mendadak dalam jumlah besar di tengah krisis.
- ❖ Mendorong Manajemen Risiko yang Lebih Baik: PSAK 71 secara tidak langsung berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal. Karena setiap penyaluran kredit baru harus diiringi dengan pembentukan CKPN yang membebani laba, manajemen bank didorong untuk lebih hati-hati dan selektif dalam proses *underwriting* dan mitigasi risiko, sehingga kualitas portofolio kredit bank secara keseluruhan dapat meningkat.

3. Peningkatan Kepercayaan Investor dan Relevansi Nilai

Peningkatan transparansi dan kualitas laba diharapkan dapat memperkuat kepercayaan investor dan memvalidasi nilai informatif laporan keuangan.

- ❖ Meningkatkan Kualitas Laba: Investor cenderung menilai laba yang dilaporkan di bawah PSAK 71 sebagai laba yang lebih berkualitas karena telah memperhitungkan risiko masa depan secara konservatif. Meskipun nominalnya mungkin lebih kecil dari sebelumnya, laba yang *prudent* mencerminkan kemampuan bank untuk mempertahankan keuntungan dalam jangka panjang, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek bisnis bank (Arifullah & Firmansyah, 2021).

- ❖ Relevansi Informasi di Pasar Modal: Adopsi standar global (IFRS) melalui PSAK 71, 72, dan 73 menjadikan laporan keuangan bank Indonesia lebih komparabel dengan laporan keuangan bank internasional. Peningkatan komparabilitas ini penting bagi investor asing. Selain itu, informasi akuntansi yang baru, karena dianggap lebih relevan dan *forward-looking*, memiliki potensi untuk meningkatkan relevansi nilai (*value relevance*) informasi akuntansi terhadap harga saham di pasar modal, yang menjadi indikasi bahwa investor menggunakan informasi tersebut dalam pengambilan Keputusan.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Penerapan PSAK 71, 72, dan 73 telah meningkatkan transparansi, akurasi, dan keandalan laporan keuangan perbankan di Indonesia. Ketiga standar ini membuat bank lebih hati-hati dalam mengelola risiko, menampilkan kewajiban secara lebih terbuka, serta menyesuaikan praktik pelaporan dengan standar internasional (IFRS), sehingga memperkuat kepercayaan publik dan stabilitas keuangan nasional.

3.2. Saran

Bank perlu terus meningkatkan kualitas data, sistem pelaporan, dan kompetensi SDM agar penerapan PSAK berjalan optimal. Regulator juga disarankan memperkuat pengawasan dan memberikan pedoman teknis agar standar ini diterapkan secara konsisten di seluruh sektor perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ang Prisila Kartin, K., St Vena Purnamasari, V., Yusni Warastuti, Y. W., Bella Klarissa, B., Jimmy Christofer, J., & Amadea Thirza, T. Post Implementation Review PSAK 71, 72 dan 73 pada Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia.
- Arifullah, M. N., & Firmansyah, A. (2021). *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*. (Terkait *prudence* dan kualitas laba).
- Dwimartani, V. (2020). Dikutip dalam Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) Vol. 5, No. 1. *PENGARUH PENERAPAN PSAK 71, 72, DAN 73 TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR ESKTERNAL*. STIESIA Surabaya. (Terkait PSAK 72).
- FEB UGM. (2019). *Dampak Penerapan PSAK 71, 72, dan 73*. (Terkait PSAK 73 dan *off-balance sheet*).
- Ikatan Akuntansi Indonesia (2017). Standar Akuntansi Keuangan di akses dari [SAK Disahkan Selama Tahun 2017](#)
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *PSAK 73: Sewa (Leases)*. IAI Global. <https://web.iaiglobal.or.id/>
- Kartin, A. P., Purnamasari, V., & Warastuti, Y. (2023, January). Dampak implementasi PSAK 71 di masa pandemi: pengujian pada perusahaan publik Indonesia. In *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* (pp. 319-329).
- Oktavianus, Y. (2025). Analisis Laporan Keuangan Bank BRI: Dampak Penerapan Standar Akuntansi Keuangan terhadap Kinerja Keuangan. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 5(2), 135-146.
- PwC Indonesia. (2023). *Practical Guide to PSAK 71, 72, and 73 Implementation*. Price water house Coopersn Indonesia. <https://www.pwc.com/id/en/publications/assurance/practical-guide-to-psak-2023.pdf>
- Sibarani, B. B. (2021). Penerapan PSAK 71 Pada PT Bank IBK Indonesia Tbk. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsuraya*, 6(2).

STUDI KASUS

Sejak diberlakukannya PSAK 71, 72, dan 73 pada tahun 2020, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjadi salah satu bank di Indonesia yang cepat menyesuaikan diri dengan perubahan standar akuntansi tersebut. Penerapan PSAK 71 membuat BCA harus mencadangkan potensi kerugian kredit lebih besar dengan metode *expected credit loss (ECL)*. Hal ini sempat menurunkan laba bersih pada awal penerapan, tetapi meningkatkan kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit dan memperkuat ketahanan terhadap risiko gagal bayar.

Melalui PSAK 72, BCA menyesuaikan pengakuan pendapatan non-bunga seperti biaya administrasi dan layanan digital. Pendapatan kini diakui sesuai periode layanan, bukan sekaligus di awal transaksi, sehingga laporan keuangan menjadi lebih transparan dan mencerminkan kegiatan usaha yang sesungguhnya.

Sementara itu, PSAK 73 membuat seluruh kontrak sewa jangka panjang seperti gedung kantor dan ATM harus diakui sebagai aset hak-guna dan liabilitas sewa. Akibatnya, total aset dan kewajiban meningkat, namun informasi keuangan menjadi lebih terbuka dan akurat.

Secara keseluruhan, penerapan tiga standar ini membuat laporan keuangan BCA lebih transparan, akurat, dan sesuai standar internasional, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap kinerja dan tata kelola bank.

Pertanyaan

1. Mengapa penerapan PSAK 71 dapat menurunkan laba bank pada awal implementasinya?
2. Bagaimana PSAK 72 meningkatkan transparansi pengakuan pendapatan non-bunga?
3. Apa manfaat utama PSAK 73 bagi keandalan laporan keuangan bank?